

**ANALISIS KINERJA TINDAK LANJUT AUDIT: PERBANDINGAN
SEBELUM DAN SELAMA IMPLEMENTASI APLIKASI SIPTL**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : AHMAD JAELANI

NIM : 126231075

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

Jakarta

2025

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS KINERJA TINDAK LANJUT AUDIT: PERBANDINGAN
SEBELUM DAN SELAMA IMPLEMENTASI APLIKASI SIPTL**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : AHMAD JAELANI

NIM : 126231075

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI AKUNTAN**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN FAKULTAS

EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2025

**ANALISIS KINERJA TINDAK LANJUT AUDIT: PERBANDINGAN
SEBELUM DAN SELAMA IMPLEMENTASI APLIKASI SIPTL**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



Ahmad Jaelani

126231075

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Dr. Jamaludin Iskak, M.Si., Ak., CACP., CA., CFI., CPA., ASEAN CPA

ABSTRAK

Studi ini mengkaji dampak sistem SIPTL terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia dalam menindaklanjuti rekomendasi audit. Menggunakan pendekatan kuasi-eksperimental, penelitian ini membandingkan data kinerja tindak lanjut sebelum (2015-2016) dan setelah (2017-2023) implementasi SIPTL. Uji t-sampel berpasangan mengungkapkan peningkatan yang signifikan dalam volume dan kepatuhan tindak lanjut, serta pengurangan yang signifikan pada rekomendasi yang belum terselesaikan selama periode SIPTL. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem SIPTL telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit, mendorong tata kelola yang lebih baik dan akuntabilitas. Studi ini menyoroti potensi platform digital seperti SIPTL untuk merampingkan pengawasan sektor publik dan mengurangi penyimpangan keuangan, menawarkan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dan pengembang sistem. Dengan memberikan bukti empiris tentang dampak berkelanjutan SIPTL terhadap tata kelola, penelitian ini berkontribusi pada diskusi yang lebih luas tentang pemanfaatan sistem informasi untuk meningkatkan akuntabilitas sektor publik.

Kata Kunci: sistem SIPTL, kinerja tindak lanjut audit, pemerintah daerah; desain kuasi-eksperimental; tata kelola dan akuntabilitas; pengawasan sektor publik.

ABSTRACT

This study examines the impact of the SIPTL system on the performance of local governments in Indonesia in addressing audit recommendations. Using a quasi-experimental approach, the research compares follow-up performance data before (2015-2016) and after (2017-2023) the SIPTL implementation. Paired sample t-tests reveal substantial improvements in the volume and compliance of follow-up actions, along with a significant reduction in unresolved recommendations during the SIPTL period. These findings indicate that the SIPTL system has enhanced the efficiency and effectiveness of audit processes, promoting better governance and accountability. The study highlights the potential of digital platforms like SIPTL to streamline public sector oversight and reduce financial irregularities, offering valuable insights for policymakers and system developers. By providing empirical evidence of SIPTL's sustained impact on governance, this research contributes to the broader discourse on leveraging information systems for improved public sector accountability.

Keywords: SIPTL system; audit follow-up performance; local governments; quasi-experimental design; governance and accountability; public sector oversight.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara.

Selama proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materiil yang tak terhingga selama masa studi.
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA, selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara dan dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan arahan yang sangat berharga.
5. Dr. Herlin Tundjung Setijaningsih, S.E., Ak., M.Si, CA., selaku Koordinator PPA, atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama masa studi.
7. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 21 Desember 2024

Ahmad Jaelani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Teori <i>Stewardship</i> dan Teori <i>Agensi</i>	6
2.2 Tinjauan Pustaka tentang Tindak Lanjut Audit dan Platform Digital.....	6
2.3 Pengembangan Hipotesis	9
BAB III METODE PENELITIAN	11
3.1 Metode dan Kerangka Penelitian	11
3.2 Data dan Sampel	11
3.3 Metode Analisis	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	13
4.1 Statistik Deskriptif	13
4.2 Analisis Statistik	14
4.3 Pengujian Hipotesis H_1	15
4.4 Pengujian Hipotesis H_2	16
4.5 Pengujian Hipotesis H_3	16
4.6 Analisis Dampak Jangka Panjang SIPTL	17
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	20
REFERENSI	23

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif	14
Tabel 4.2 Hasil Paired Samples Test	15
Tabel 4.3 Implikasi Implementasi	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian.....	11
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan dasar bagi tata kelola pemerintahan kontemporer, terutama di negara berkembang, karena prinsip-prinsip tersebut meningkatkan kepercayaan publik dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia berperan sebagai pengawas keuangan negara, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. BPK melakukan audit terhadap lembaga pemerintah dan memberikan temuan serta rekomendasi untuk mengatasi inefisiensi dan ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan (Yamin et al., 2022).

Misi BPK berfokus pada memastikan praktik pengelolaan keuangan yang sehat di antara entitas pemerintah. Melalui audit sistematis, BPK mengevaluasi kegiatan keuangan pemerintah daerah, mengidentifikasi area-area untuk perbaikan. Abdullah et al., (2022) mencatat bahwa pemeriksaan BPK bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan, kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan efektivitas pengendalian internal. Mainingrum et al. (2023) lebih lanjut menekankan bahwa praktik audit yang efektif berkorelasi dengan hasil pengelolaan keuangan dan tata kelola yang lebih baik, menyoroti pentingnya rekomendasi BPK.

BPK mengkategorikan rekomendasinya menjadi empat jenis kepatuhan tindak lanjut: (1) Tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi, (2) Tindak lanjut tidak sesuai dengan rekomendasi, (3) Rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan (4) Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan yang sah (Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017). Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut dalam waktu 60 hari sejak diterbitkannya laporan audit. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan sanksi, tetapi BPK menekankan transparansi dan akuntabilitas untuk mendorong kepatuhan, yang meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di dalam pemerintah daerah (Nurhadianto & Sugiri, 2022).

Proses audit sangat penting untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan hasil tata kelola. Proses tindak lanjut, di mana entitas menerapkan langkah-langkah korektif berdasarkan rekomendasi-rekomendasi ini, sangat penting untuk mencapai perbaikan yang dimaksudkan. Tanpa tindak lanjut yang tepat, nilai audit berkurang, meningkatkan

peluang terjadinya kecurangan dan inefisiensi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, BPK memperkenalkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) pada tahun 2017, sebuah sistem berbasis web yang dirancang untuk mengotomatiskan dan menyederhanakan pemantauan tindakan tindak lanjut (Yatun, 2021).

Sebelum SIPTL, proses tindak lanjut audit menghadapi inefisiensi yang signifikan, karena entitas pemerintah menyerahkan dokumentasi fisik untuk tindakan tindak lanjut, mengakibatkan keterlambatan dan peningkatan kesalahan manusia. Ketergantungan pada proses manual ini menyebabkan banyak rekomendasi audit yang tidak ditindaklanjuti untuk jangka waktu yang lama, mengurangi dampak pengawasan BPK (Furqan et al., 2020; Yamin et al., 2022).

SIPTL mengotomatiskan proses tindak lanjut, memungkinkan entitas pemerintah untuk mengirimkan laporan secara *online* dan memantau kemajuan secara *real-time*. Fitur utama mencakup pembaruan data secara *real-time*, yang memungkinkan BPK dan entitas yang diaudit untuk melacak tindakan tindak lanjut tanpa pertemuan tatap muka, sehingga mengurangi beban administratif (Djaisin, 2021). SIPTL juga mencakup notifikasi dan pengingat otomatis untuk menjaga agar entitas tetap mengetahui tenggat waktu dan rekomendasi yang belum terselesaikan, mempromosikan akuntabilitas (Yatun, 2021). Selain itu, SIPTL memfasilitasi kolaborasi jarak jauh, memungkinkan auditor dan pejabat pemerintah untuk terlibat dalam pertemuan virtual, sebuah kemampuan yang terbukti berharga selama pandemi COVID-19.

Pandemi memperburuk inefisiensi yang ada dengan membatasi interaksi tatap muka, menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan sistem yang efisien untuk memantau tindakan tindak lanjut secara efektif. Tantangan-tantangan ini menyoroti perlunya inovasi dalam proses audit, membuka jalan bagi SIPTL untuk meningkatkan komunikasi jarak jauh dan meningkatkan efisiensi pelacakan rekomendasi audit (Samuel Onimisi Dawodu et al., 2023).

Implementasi SIPTL memberikan pelajaran berharga untuk meningkatkan tata kelola di bidang-bidang di mana pemantauan *real-time* dan platform digital dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi audit. Hal ini sangat relevan di sektor-sektor seperti pengadaan publik, kesehatan, dan pendidikan, di mana pengelolaan sumber daya yang efektif sangat penting (Cordery & Hay, 2019). SIPTL telah secara signifikan meningkatkan proses tindak lanjut audit Indonesia dengan meningkatkan ketepatan waktu, kualitas, dan efisiensi, sehingga

memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik (Danu et al., 2023).

Platform digital seperti SIPTL sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi audit, memastikan implementasi yang efektif dan pengelolaan sumber daya publik yang bertanggung jawab. SIPTL mempromosikan akuntabilitas dan peningkatan berkelanjutan, menetapkan tolok ukur untuk proses tindak lanjut audit dan memberikan wawasan untuk aplikasi yang lebih luas. Investasi yang berkelanjutan dalam teknologi, pengembangan kapasitas, dan keamanan siber sangat penting untuk mempertahankan kemajuan dan memperkuat kerangka kerja tata kelola di Indonesia (Ahmad et al., 2023).

Meskipun penggunaan platform digital dalam tata kelola sektor publik semakin meningkat, dampak spesifik dan berkelanjutan dari sistem ini terhadap kepatuhan audit jangka panjang masih kurang diteliti, terutama dalam konteks desentralisasi seperti Indonesia. Penelitian sebelumnya telah menekankan peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi tata kelola dengan menyederhanakan proses dan meningkatkan aksesibilitas data (Danu et al., 2023). Namun, hanya sedikit penelitian yang memeriksa efektivitas platform tersebut dalam jangka waktu yang lama, terutama mengenai dampaknya terhadap pemerintah daerah dengan kapasitas administratif dan infrastruktur teknologi yang beragam (Van Puyvelde et al., 2016). Literatur yang ada terutama berfokus pada hasil langsung, seperti pengurangan dokumen dan peningkatan transparansi, tanpa menilai kapasitas alat digital seperti SIPTL untuk mengatasi masalah kepatuhan yang berkelanjutan atau mempertahankan kinerja tindak lanjut audit yang konsisten dari waktu ke waktu.

Selain itu, keterbatasan yang signifikan dari SIPTL adalah ketergantungannya pada partisipasi manusia. Meskipun sistem mengotomatiskan banyak proses tindak lanjut, diperlukan keterlibatan aktif dari pejabat pemerintah untuk memasukkan data dan melacak kemajuan. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa pelatihan dan insentif yang tepat, beberapa pejabat mungkin tidak sepenuhnya memanfaatkan sistem ini, yang dapat mengurangi efektivitasnya (Rumasukun, 2024).

Kekhawatiran mengenai keberlanjutan SIPTL jangka panjang juga signifikan. Pembaruan dan pemeliharaan rutin sangat penting untuk memastikan fungsionalitas dan keamanan, terutama mengingat meningkatnya kekhawatiran tentang keamanan siber. Melindungi SIPTL dari serangan siber sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik dan integritas proses audit (Furqan et al., 2020). Investasi

berkelanjutan dalam peningkatan sistem dan langkah-langkah keamanan siber sangat penting untuk mempertahankan efektivitasnya (Ahmad et al., 2023).

Meskipun tantangan ini, SIPTL mewakili kemajuan substansial dalam tata kelola sektor publik, menawarkan wawasan berharga bagi negara lain yang berupaya untuk meningkatkan proses audit mereka. Dengan memanfaatkan teknologi, SIPTL telah meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas tindakan tindak lanjut sambil mendorong budaya akuntabilitas dan transparansi di dalam pemerintah daerah Indonesia. Kemampuannya untuk data real-time, notifikasi otomatis, dan kolaborasi jarak jauh menempatkannya sebagai model untuk tata kelola digital di sektor publik (Han & Xie, 2023).

Studi ini mengeksplorasi bagaimana sistem SIPTL telah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi audit di Indonesia, khususnya memeriksa bagaimana SIPTL telah mengurangi keterlambatan dan menyelesaikan tindakan tindak lanjut yang tidak lengkap. Studi ini merupakan penyelidikan ilmiah baru yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang ada dalam literatur mengenai dampak jangka panjang platform digital terhadap kepatuhan audit, terutama dalam konteks desentralisasi seperti Indonesia. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang terutama berfokus pada hasil langsung, seperti efisiensi proses audit atau pengurangan dokumen, studi ini menggali lebih dalam efektivitas berkelanjutan SIPTL dari waktu ke waktu dan implikasinya bagi tata kelola di wilayah dengan kapasitas teknologi yang beragam.

Studi ini mengatasi kesenjangan analisis dengan mengevaluasi dampak jangka panjang SIPTL terhadap efektivitas tindak lanjut audit di seluruh konteks regional yang beragam di Indonesia. Studi ini memeriksa bagaimana SIPTL mendukung kepatuhan di daerah dengan sumber daya teknologi yang bervariasi, menawarkan wawasan tentang bagaimana platform digital dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi disparitas dalam praktik tata kelola. Dengan membandingkan metrik kinerja audit sebelum dan setelah implementasi SIPTL, studi ini memberikan perspektif unik terhadap literatur tentang tata kelola digital, menawarkan bukti empiris tentang peran SIPTL dalam mempertahankan kepatuhan audit di dalam struktur administratif desentralisasi Indonesia (Indriani et al., 2024).

Kesenjangan penelitian yang ada menyoroti kebutuhan untuk lebih memahami kinerja platform digital dalam lingkungan tata kelola yang berbeda dari waktu ke waktu, yang sangat penting untuk mengembangkan solusi tata kelola yang efektif di

seluruh wilayah (Furqan et al., 2020; Indriani et al., 2024). Pemahaman ini sangat penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi yang bertujuan untuk mengoptimalkan efektivitas tindak lanjut audit dan memastikan akuntabilitas dalam operasi sektor publik.

Dalam tata kelola Indonesia, memastikan akuntabilitas dan tindak lanjut audit yang tepat waktu di antara pemerintah daerah telah menjadi tantangan yang terus-menerus karena kapasitas administratif dan variasi regional dalam infrastruktur teknologi (Furqan et al., 2020). Pengenalan SIPTL pada tahun 2017 mewakili pergeseran yang signifikan dalam pendekatan tindak lanjut audit, mengatasi inefisiensi yang secara historis telah membatasi efektivitas rekomendasi BPK (Yatun, 2021). Meskipun desain SIPTL untuk meningkatkan ketepatan waktu, kualitas, dan konsistensi tindakan tindak lanjut, terdapat sedikit penelitian tentang efektivitasnya di wilayah dengan akses sumber daya dan keahlian teknologi yang berbeda.

Untuk secara efektif memandu studi ini dan memastikan kejelasan dalam menangani masalah yang diidentifikasi, studi ini menetapkan beberapa tujuan utama. Pertama, bertujuan untuk mengevaluasi dampak SIPTL terhadap kecepatan respons pemerintah daerah terhadap rekomendasi audit yang dikeluarkan oleh BPK. Kedua, studi ini bertujuan untuk menilai peran SIPTL dalam meningkatkan kualitas kepatuhan terhadap rekomendasi tersebut. Terakhir, bertujuan untuk menentukan bagaimana SIPTL telah mempengaruhi tingkat temuan audit yang belum ditindaklanjuti dari waktu ke waktu. Secara kolektif, tujuan-tujuan ini memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk menganalisis kinerja SIPTL dan mengatasi potensi bias dalam perumusan masalah, sehingga memastikan bahwa kesimpulan studi ini relevan dan dapat ditindaklanjuti bagi pembuat kebijakan. Fokus terstruktur ini sangat penting untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi pemangku kepentingan yang berupaya untuk mengoptimalkan proses tindak lanjut audit di Indonesia dan struktur tata kelola desentralisasi serupa.

REFERENSI

- Abdullah, M. I., Sudirman, Masdar, R., Din, M., & Firman, M. F. (2022). Antecedents of the Accountability in Indonesian Local Government Financial Reporting. *International Journal of Professional Business Review*, 7(5), e0709. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i5.e709>
- Ahmad, H., Mokhtar, N., & Ismail, S. (2023). Bibliometric Analysis and Review of Digital Audit Practices in the Public Sector of Different Countries. *IPN Journal of Research and Practice in Public Sector Accounting and Management*, 13(2). <https://doi.org/10.58458/ipnj.v13.02.03.0094>
- Alotaibi, E. M., & Alnesafi, A. (2023). Assessing the impact of audit software on audit quality: Auditors' perceptions. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 17(1), 97–108. <https://doi.org/10.33094/ijaefa.v17i1.1068>
- Amali, L. N., Katili, M. R., Suhada, S., Hadjaratie, L., & Mardlatillah, H. (2022). Technology Acceptance Model in Government Context: A Systematic Review on the Implementation of IT Governance in a Government Institution. *Jurnal Online Informatika*, 7(1), 80. <https://doi.org/10.15575/join.v7i1.853>
- Ansell, C., & Miura, S. (2020). Can the power of platforms be harnessed for governance? *Public Administration*, 98(1), 261–276. <https://doi.org/10.1111/padm.12636>
- Asrori, Nur Hasanah, J., & Ihlashul 'Amal, M. (2020). Determinants of Financial Performance of Regional Government Revenue Growth in Central Java Province, Indonesia. *KnE Social Sciences*, 12(5), 332. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6632>
- Aswar, K. (2019). Financial Performance of Local Governments in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, 4(6). <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2019.4.6.164>
- Azalan, N. S., Mokhtar, M. M., & Abdul Karim, A. H. (2022). Modelling e-Zakat Acceptance among Malaysian: An Application of UTAUT Model during Covid19 Pandemic. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(12). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i12/15958>
- Cordella, A., & Paletti, A. (2019). Government as a platform, orchestration, and public

- value creation: The Italian case. *Government Information Quarterly*, 36(4).
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101409>
- Cordery, C. J., & Hay, D. (2019). Supreme audit institutions and public value: Demonstrating relevance. *Financial Accountability & Management*, 35(2), 128–142. <https://doi.org/10.1111/faam.12185>
- Danu, D. E. A., Supardi, S., Sutanto, S. T. J. P., & Riko, R. S. (2023). E-Services: Implementation of Digital-Based Public Services in The 4.0 Era. *Athena: Journal of Social, Culture and Society*, 1(3), 87–92.
<https://doi.org/10.58905/athena.v1i3.40>
- de Widd, D., Llewelyn, I., & Thorogood, T. (2022). Liberalising audit markets for local government: The five forces at work in England and the Netherlands. *Financial Accountability and Management*, 38(3), 394–425.
<https://doi.org/10.1111/faam.12302>
- Djaisin, Y. C. (2021, September). Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Harus Bermanfaat. *Warta Pemeriksa*, IV, 22–23.
- ELKheshin, S., & Saleeb, N. (2020). Assessing the Adoption of E-government Using Tam Model: Case of Egypt. *International Journal of Managing Information Technology*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.5121/ijmit.2020.12101>
- Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 33(5), 535–559. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2019-0173>
- Garrett, P. M., Wang, Y., White, J. P., Kashima, Y., Dennis, S., & Yang, C.-T. (2021). High national acceptance for COVID-19 contact tracing technologies in Taiwan (Preprint). <https://doi.org/10.2196/preprints.31522>
- Hadi, A. (2018). Bridging Indonesia's Digital Divide: Rural-Urban Linkages? *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 22(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jsp.31835>
- Han, Y., & Xie, L. (2023). Sustainable Governance of Digital Platform Ecosystem: A Life Cycle Perspective through Multiple Governance Parties.
<https://doi.org/10.20944/preprints202306.1886.v1>
- Hari Setiabudi Husni, Ford Lumban Gaol, Suhono Harso Supangkat, & Benny Ranti. (2022). DIGITAL TWIN CONCEPT FOR INDONESIA DIGITAL GOVERNMENT INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE. *International Journal Science and Technology*, 1(2), 45–52.

<https://doi.org/10.56127/ijst.v1i2.146>

- He, K., Pan, X., Tian, G. G., Wu, Y., & Cai, C. (2022). How Does Reciprocal Rent-Seeking Between Politicians and Auditors Influence Audit Quality? Evidence from China. *Accounting Horizons*, 36(3), 103–126. <https://doi.org/10.2308/HORIZONS-19-118>
- Hendri Wijaya, J. (2023). E-Government in Indonesia: Policy Review and Implementation of Jokowi's Government. *TheJournalish: Social and Government*, 4(3), 302–309. <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i3.563>
- Indra, I., Iskak, J., & Khaq, A. (2022). Enhancing the Role of the Audit Board of the Republic of Indonesia in Fraud Detection. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 131–143. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.935>
- Indriani, D., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2024). The impact of audit findings and follow-up actions on audit recommendations on audit opinions of financial statements with APIP capabilities as a moderating variable (A study on provincial/regencies/cities governments in Suluttenggo Region). *The Contrarian: Finance, Accounting, and Business Research*, 3(2), 113–124. <https://doi.org/10.58784/cfabr.159>
- Koskelainen, T., Kalmi, P., Scornavacca, E., & Vartiainen, T. (2023). Financial literacy in the digital age—A research agenda. *Journal of Consumer Affairs*, 57(1), 507–528. <https://doi.org/10.1111/joca.12510>
- Larasati, N. F., Aprilia, D., Pastika, D. B. W., Wahyudi, I. A., & Anandita, D. A. (2022). INVESTMENT OF INSURANCE FUNDS AS AN ALTERNATIVE TO INFRASTRUCTURE FINANCING THROUGH GOVERNMENT AND PRIVATE COOPERATION IN THE MIDST OF COVID-19 PANDEMIC. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(2). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i2.5232>
- Liu, M., & Wu, G. (2024). Development and Application of Enterprise Financial Risk Analysis System Based on Data Mining Technology (pp. 75–81). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-262-0_9
- Luo, Y., Tang, Z., Cai, X., & Chen, Y. (2023). A Review of Research on Digital Platform Governance in China: Hotspots, Characteristics, and Frontiers (pp. 1170–1177). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-126-5_130
- Lutfi, A., & Alqudah, H. (2023). The Influence of Technological Factors on the Computer-Assisted Audit Tools and Techniques Usage during COVID-19.

- Sustainability (Switzerland), 15(9). <https://doi.org/10.3390/su15097704>
- Mainingrum, R., Sjarlis, S., Oktaviani, A. R., & Reno Fithri Meuthia. (2023). The Effect of Audit Findings, Follow-Up Audit Recommendations, And BPK Opinions from The Previous Year on The Determination of Opinions in Local Government Financial Statements. *Economics, Business, Accounting & Society Review*, 2(1), 58–73. <https://doi.org/10.55980/ebasr.v2i1.56>
- Mensah, I. K. (2020). The Impact of Political Trust on E-Government Services Adoption. *International Journal of Technology Diffusion*, 11(4), 27–47. <https://doi.org/10.4018/IJTD.2020100102>
- Noor, N. R. A. M., Ramayah, T., Khadzil, S. A. A. J. S., Noor, N. H. H. M., & Yusof, W. Y. R. B. W. (2023). SCOPE OF AUDIT AND EFFECTIVENESS OF PUBLIC SECTOR AUDIT IN MALAYSIA. *International Journal of Business and Society*, 24(1), 330–342. <https://doi.org/10.33736/ijbs.5619.2023>
- Noviani, N., & Muda, I. (2022, July 27). The Evolution of Accounting Software: Review of Blockchain Technology in Audit. <https://doi.org/10.4108/eai.25-11-2021.2318839>
- Nurhadianto, T., & Sugiri, S. (2022). Transparency of Local Financial Management: Evidence from Local Governments in Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 6(1), 50. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v6i1.5433>
- Okfitasari, A., Nur Rohmah, S., & Novianingsih, R. (2022). INFORMATION TECHNOLOGY AND REMOTE AUDIT DURING COVID 19 PANDEMIC. *Proceeding of International Conference on Science, Health, And Technology*, 136–144. <https://doi.org/10.47701/icohetech.v3i1.2213>
- Otuma O. Andako. (2023). Navigating the path to economic empowerment: overcoming challenges in digital platforms for economic empowerment. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 20(3), 1503–1521. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.20.3.1450>
- Prabhawa, W., & Prasajo, E. (2021). Integritas Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Supreme Audit Institution. *Sospol*, 7(1), 1–17. <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i1.14609>
- Rahmasari, A., & Setiawan, D. (2022). Maturity of Internal Control System, the Capability of Internal Auditors, and Performance Accountability in Local Governments. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 159–176. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.830>

- Rumasukun, M. R. (2024). Developing Auditor Competencies through Continuous Training and Education. *Golden Ratio of Auditing Research*, 4(1), 14–23. <https://doi.org/10.52970/grar.v4i1.384>
- Samuel Onimisi Dawodu, Adedolapo Omotosho, Zainab Efe Egieya, Abimbola Oluwatoyin Adegbite, & Sarah Kuzankah Ewuga. (2023). Advancements in computer-aided audit technologies: Impact on loan asset quality in banking. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 20(3), 876–887. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.20.3.2554>
- Setyaningrum, D., & Azhar, K. (2015, November). The Effect of Audit Findings and Follow up of Audit Recommendation on Corruption of Ministries / Institutions in Indonesia. www.transparency.org
- Setyaningrum, D., Gani, L., Martani, D., & Kuntadi, C. (2013). The Effect of Auditor Quality on the Follow-Up of Audit Recommendation. *International Research Journal of Business Studies*, 6(2), 89–104. <https://doi.org/10.21632/irjbs.6.2.89-104>
- Sulistiyo, A. (2023). Influencers perceived usefulness, perceived ease of use and organizational support for the use of e-performance applications using technology acceptance models in regional work units Brebes Regency. *Gema Wiralodra*, 14(2), 730–735. <https://doi.org/10.31943/gw.v14i2.390>
- Susanto, T. D., Zakariya, A. Z., & Zulandra, R. (2018). What Motivate Government Employees to Use an e-Government System? The Adopter Profiles and Acceptance Factors. *Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology*, 15(4), 143–148. <https://doi.org/10.19026/rjaset.15.5845>
- Torfin, J., & Bentzen, T. Ø. (2020). Does stewardship theory provide a viable alternative to control-fixated performance management? *Administrative Sciences*, 10(4). <https://doi.org/10.3390/admsci10040086>
- Ullah, S., Hussain, S. I., Nabi, A. A., & Mubashir, K. A. (2022). Role of Regulatory Governance in Financial Stability: A Comparison of High and Low Income Countries. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, 11(1), 207–226. <https://doi.org/10.2478/jcbtp-2022-0009>
- Ummah, A., Maryam, S., & Wahidin, D. T. S. (2022). E-Government Implementation to Support Digital Village in Indonesia: Evidence from Cianjur Village, Bogor Regency. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 245–259. <https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.14038>

- Van Puyvelde, S., Caers, R., Du Bois, C., & Jegers, M. (2016). Managerial Objectives and the Governance of Public and Non-Profit Organizations. *Public Management Review*, 18(2), 221–237. <https://doi.org/10.1080/14719037.2014.969760>
- Viendyasari, M. (2020). The Application of Digital Administration to Minimize Maladministration in Public Services: A Case Study of Jakarta Investment and One Stop Service Department. *Proceedings of the 3rd International Conference on Vocational Higher Education (ICVHE 2018)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200331.133>
- Yamin, R., Mas'ud, M., & Sjarlis, S. (2022). Management of Assets and Follow-Up the Findings of the Audit Board to Increase Financial Performance of Local Governments. *Economics, Business, Accounting & Society Review*, 1(1), 37–43. <https://doi.org/10.55980/ebasr.v1i1.8>
- Yatun, I. (2021, September). Rekomendasi Jangan Sampai “Basi.” *Warta Pemeriksa*, IV, 4–6.
- Yusuf, M. (2020). The Impact of Local Government Accounting Systems and Performance-Based Budgeting on Local Government Performance Accountability. *Jurnal Economic Resource*, 3(2). <https://doi.org/10.57178/jer.v3i2.225>
- Zhang, Z. (2023). Analysis of Digital Transformation of Financial Management in the Era of Artificial Intelligence. *Highlights in Business, Economics and Management*, 23, 876–882. <https://doi.org/10.54097/v4nj7935>